

ANALISIS DETERMINAN DAYA SAING EKONOMI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**Ella Yuwina Siregar
Inggrita Gusti Sari NST, SE., M.Si**

ABSTRAK

Daya saing ekonomi merupakan kemampuan suatu perekonomian untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil, diikuti dengan kemampuan untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional sehingga meningkatkan standar kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penentu tingkat daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014 dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara terhadap 30 responden yang terdiri dari mahasiswa, pengajar, masyarakat umum, birokrasi, perbankan, non perbankan, dan pengusaha.

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor perekonomian daerah menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bobot sebesar 0,320, diikuti dengan faktor infrastruktur fisik (0,217), faktor tenaga kerja dan produktivitas (0,214), kemudian faktor dengan bobot yang cukup rendah yaitu faktor kelembagaan (0,132) dan yang terakhir yaitu faktor sosial politik (0,117).

Kata Kunci : Daya Saing Ekonomi, Analisis Hierarki Proses

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun ekonomi daerahnya. Dalam menghadapi persoalan pembangunan ekonomi maka suatu daerah harus membangun perekonomian yang memiliki daya saing dan efisien. Pada era otonomi daerah ini maka program pembangunan ekonominya harus desentralistis dan memiliki daya saing, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi daerah (Subandi : 140).

Dalam era otonomi daerah ini, suatu daerah dituntut harus mampu mengembangkan kemampuannya sendiri untuk mandiri. Untuk itu pertimbangan ekonomi dijadikan pijakan dalam sistem birokrasi karena tujuan ekonomi sangat mewarnai dalam aspek organisasi dalam otonomi daerah yang kemudian berkaitan dengan peran birokrasi. Disini birokrasi dituntut untuk dapat menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan otonomi dan ekonomi, khususnya ekonomi rakyat. Dengan demikian birokrasi harus lebih efektif dan

efisien sehingga mampu membawa daerahnya memiliki daya saing yang tinggi (Subandi : 141).

Sementara itu, tingkat persaingan antar negara dari waktu ke waktu semakin tinggi sebagai dampak dari munculnya fenomena globalisasi ekonomi. Globalisasi ini mencerminkan suatu tantangan, dimana semakin tingginya tingkat persaingan antar negara ini akan berdampak langsung pada perekonomian daerah terlebih lagi setelah era otonomi daerah. Daya saing ekonomi daerah tidak dapat dilihat dalam ukuran nasional yang berupa daya saing antar ekonomi daerah, tetapi harus bersaing dalam ukuran internasional (Halwani,2002:422). Maka dari itu, untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang didesain dengan standar internasional. Kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, memperkuat sumber daya manusia aparatur (birokrasi) dan masyarakat daerah, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing yang tinggi pada era globalisasi ekonomi ini (Subandi : 142)

Menurut *World Economic Forum (WEF)* 2014-2015, tingkat daya saing Indonesia telah menempati peringkat ke-34 dari 144 negara atau naik dari peringkat tahun sebelumnya (2013-2014) yaitu peringkat ke-38. Menurut WEF, kenaikan ranking indeks daya saing Indonesia pada periode ini dikarenakan perbaikan di beberapa kriteria seperti infrastruktur, konektivitas, kualitas tata kelola sektor swasta dan publik efisiensi pemerintah, dan pemberantasan korupsi. Tingginya tingkat persaingan antarnegara ini tidak hanya akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga akan berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu wilayah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tujuan pemekaran menurut UU Nomor 23 Tahun 2008 adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengolahan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memacu perkembangan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada khususnya. Di samping itu, mewujudkan berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara juga di pandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Yusuf, 2011)

Persaingan yang semakin tajam dalam era globalisasi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan daerahnya sedemikian rupa agar dapat berdaya saing tinggi. Meningkatkan kemampuan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai daerah pemekaran yang saat ini masih belum ditinjau bagaimana tingkat daya saing daerahnya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia dianggap penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan di daerah

tersebut. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor penentu daya saing daerah ini baik dari aspek keunggulan maupun keterbatasan, diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menetapkan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke dalam taraf hidup yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

European Competitiveness Index merupakan publikasi tentang pemeringkatan daya saing yang mengukur, membandingkan dan meneliti daya saing bukan saja hanya antar negara, tetapi juga antar daerah di Eropa. *European Competitiveness Index 2006* lebih menekankan analisis terhadap daya saing daerah. Sementara itu, metodologi yang dikembangkan dalam *European Competitiveness Index* adalah Model Tiga Faktor (*Three Factor Model*). Model tersebut merupakan kerangka kerja linier untuk menganalisis daya saing berdasarkan faktor: (1) input; (2) output; dan (3) outcome. Variabel-variabel yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan daya saing mencakup variabel-variabel yang mewakili indikator-indikator sebagai berikut: (1) kreativitas; (2) kinerja ekonomi; (3) infrastruktur dan aksesibilitas; (4) tenaga kerja terdidik; (5) pendidikan. Variabel-variabel dari kelima indikator ini tersebar ke dalam faktor input, output dan outcome.

Pemeringkatan daya saing daerah juga dilakukan oleh UK dalam *UK Competitiveness Index* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2000. Namun demikian, metodologi yang dikembangkan kurang lebih sama. Sama halnya dengan *European Competitiveness Index*, metodologi yang dikembangkan dalam *UK Competitiveness Index* juga menggunakan Model Tiga Faktor (*Three Factor Model*) yang terdiri dari kerangka kerja linier untuk menganalisis daya saing berdasarkan faktor: (1) input; (2) output; dan (3) outcome. Ketiga faktor tersebut terdiri dari variabel-variabel pembentuknya, dimana ketiganya diberikan bobot yang sama, dengan alasan adanya hipotesis yang menyatakan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan secara ekonomi yang satu dibatasi oleh yang lainnya.

Konsep Daya Saing Daerah

Literatur yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi tentang daya saing daerah, dua diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan "*Regional Competitiveness Indicators*", serta *Centre for Urban and Regional Studies (CURDS)* dengan publikasinya "*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*".

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang daya saing suatu negara atau daerah sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil satu

kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktifitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.
- Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sector swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
- Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
- Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para competitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Indikator Utama Daya Saing Daerah

Dari berbagai literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi, indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah yaitu: (Abdullah dkk : 17)

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional maupun internasional.

3. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktifitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah.

6. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah.

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah.

9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab.

Studi mengenai daya saing daerah di Indonesia juga dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Studi KPPOD ini lebih fokus pada daya saing investasi untuk tingkat kabupaten/kota. KPPOD (2005) menyatakan bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah akan bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh suatu daerah yang bersangkutan.

Faktor pembentuk daya saing investasi terus berkembang. Faktor yang ditengarai oleh KPPOD adalah faktor kelembagaan, faktor keamanan, politik, sosial budaya, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik. Masing-masing faktor tersebut dijabarkan dalam variabel-variabel yang secara keseluruhan berjumlah 14 variabel, jumlah ini secara konsisten dijaga oleh KPPOD dalam studinya. Selanjutnya, masing-masing variabel tersebut dijabarkan lagi dalam indikator-indikator yang secara keseluruhan, untuk tahun 2005, berjumlah 47 indikator. Masing-masing faktor, variabel dan indikator yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dilakukan pembobotan. KPPOD menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process(AHP)* untuk melakukan pembobotannya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara dengan kurun waktu penelitian selama 1 bulan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional adalah salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antar peneliti yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang berkaitan dengan iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan yang mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di suatu daerah.
2. Sosial Politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik yang mengandung nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai variabel lain seperti stabilitas politik dan keamanan.
3. Perekonomian Daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, produktivitas sektoral, kemampuan keuangan daerah dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran, investasi, laju inflasi serta keterbukaan daerah terhadap arus barang dan jasa antar daerah maupun dengan luar negeri.
4. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan jasanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input).

5. Infrastruktur Fisik adalah segala struktur yang berwujud fisik (modal fisik) baik ketersediaan maupun kualitasnya yang digunakan untuk menopang keberlangsungan aktivitas perekonomian sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Metode Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel

Prosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel atau responden yang dianggap dapat mewakili segmen kelompok masyarakat yang dinilai mempunyai pengaruh atau banyak terlibat dalam peristiwa dan memiliki informasi penting yang diperlukan dalam penelitian sebagai masyarakat yang merasakan dampak besar terkait daya saing ekonomi daerah. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Purposive sampling didasarkan pada suatu pertimbangan karakteristik tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini ditetapkan jumlah sampel yang sudah cukup representatif yaitu 30 responden yang memiliki kriteria tertentu dan mewakili seluruh komponen masyarakat yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun jumlah sampel berdasarkan kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Sampel Berdasarkan Kelompok Masyarakat

NO	Kelompok Masyarakat	Responden
1	Mahasiswa /Pelajar	3
2	Staf Pengajar/Dosen/Guru	3
3	Tokoh Masyarakat	4
4	Birokrat	4
5	Perbankan	3
6	Non Perbankan	3
7	Pengusaha	10
	Jumlah	30

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama melainkan dari instansi-instansi yang terkait dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan publikasi secara resmi, buku-buku, majalah-majalah serta laporan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.

Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner

Kelompok masyarakat yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini diberikan lembaran kuisisioner. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang harus direspon oleh responden. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari kelompok masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara (1) Terbuka (open-ended), yaitu peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada, (2) Terfokus, yaitu responden diwawancarai dalam waktu yang pendek, dan (3) Terstruktur, yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Teknik wawancara dilakukan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sampel untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai saran atau keluhan masyarakat secara

langsung terhadap faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi analisis deskriptif dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Secara jelasnya, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini memberikan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor penentu daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014. Analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar (chart) dan diagram.

2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analisis ini digunakan untuk memberikan nilai bobot setiap factor dan variable dalam menghitung faktor-faktor penentu daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014. Proses pemberian bobot indicator dan sub-indikator (variabel) dilakukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui kuisioner untuk kelompok masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) awalnya dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School sekitar tahun 1970. Metode ini digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternative dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif.

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. Resiprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat kebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adalah $1/k$ lebih penting dari A.
2. Homogeneity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. Dependence, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete hierarchy).
4. Expectation, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain :

1. *Decomposition*, proses penguraian permasalahan faktor dan variabel sehingga membentuk suatu tingkatan prioritas.

2. *Comperative Judgement*, proses penilaian tingkat kepentingan reflatif terhadap elemen yang terdapat pada suatu tingkatan sehubungan dengan tingkat diatasnya yang di sajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
3. *Synthesis of Priority*, mencari eigen vector yang menunjukkan sinetesis local priority pada suatu hirarki.
4. *Logical Consistency*, melihat tingkat konsistensi jawaban responden dan diperbolehkan melakukan perbaikan penilaian yang diberikan tidak konsisten.
5. *Matriks Pairwise*, dimana tidak ada yang bernilai 0 ataupun negatif sehingga dengan skala 1-9, maka syarat tersebut terpenuhi karena elemen terkecil 1/9 dan terbesar 9.

Berikut ini arti dari angka 1-9 dalam skala penilaian perbandingan seperti yang di tunjukkan pada tabel .

Tabel 2
Skala Penilaian Perbandingan

Skala Tingkat Kepentingan	Defenisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber: Thomas L. Saaty (1991)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap 30 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didapat informasi bahwa responden berjenis kelamin pria sebesar 47% dan responden berjenis kelamin wanita sebesar 53%. Sedangkan responden yang paling banyak diwawancarai berusia 25-34 tahun berkisar 60%. Kemudian diikuti oleh responden yang berusia 15-24 berkisar sebesar 20%. Selanjutnya responden yang berusia 35-44 berkisar 17%. Serta yang berusia diatas 45 tahun

hanya sebesar 3%. Sementara itu untuk tingkat pendidikan, pada umumnya responden tamatan SMA/Sederajat sebesar 50% dan tamatan S1/S2 sebesar 50% responden. Untuk lebih jelasnya, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Pria	14	47
2	Wanita	16	53
	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase(%)
1	15 – 24	6	20
2	25 – 34	18	60
3	35 – 44	5	17
4	>45	1	3
	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SMA/Sederajat	15	50
2	S1/S2	15	50

Sumber : Data Primer Diolah

Pembobotan dan Pemeringkatan Faktor Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi daerah merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi daya saing ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing ekonomi tersebut rendah, maka daya saing ekonomi daerah tersebut juga rendah. Untuk melihat daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor penentu daya saing ekonomi dengan menentukan nilai bobot dari masing-masing faktor tersebut. Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan *Software* yaitu *Expert Choice*.

Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor lainnya dalam menentukan daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berikut ini hasil pembobotan dari faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1
Nilai Bobot dari Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi
di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil diatas menunjukkan bahwa faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014 adalah faktor perekonomian daerah yang memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 0,320. Kemudian diikuti oleh faktor Infrastruktur Fisik dengan bobot sebesar 0,217. Berikutnya oleh faktor tenaga kerja dan produktivitas dengan bobot sebesar 0,214, faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 0,132 dan kemudian faktor sosial politik yang memiliki bobot terendah sebesar 0,117.

Dari hasil pembobotan diatas, responden memberikan tanggapan bahwa faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten dipengaruhi oleh tiga faktor dengan nilai bobot terbesar, yaitu faktor perekonomian daerah, faktor infrastruktur fisik dan faktor tenaga kerja dan produktivitas. Faktor perekonomian daerah dianggap paling penting dalam menentukan tingkat daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena faktor tersebut menjadi tolak ukur bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Berikut akan dijelaskan masing-masing faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan pemeringkatan beserta variabelnya.

Faktor Perekonomian Daerah

Faktor perekonomian daerah didukung oleh 2 variabel yaitu variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi yang memberikan kontribusi penting dalam mendukung daya saing ekonomi suatu daerah. Semakin baik tingkat perekonomian suatu daerah, maka daya saing daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Variabel potensi ekonomi memiliki bobot tertinggi sebesar 0,632 atau 63% dari keseluruhan bobot faktor pendukung perekonomian daerah. Sedangkan variabel stuktur ekonomi memiliki bobot sebesar 0,368 atau 37%.

Faktor Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik merupakan faktor pendukung yang penting bagi perkembangan kegiatan usaha masyarakat di suatu daerah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik yang baik dan memadai sangat mempengaruhi kelancaran dunia usaha di suatu daerah. Semakin berkembang suatu usaha, maka kebutuhan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur fisik di daerah tersebut juga akan semakin besar.

Faktor infrastruktur fisik didukung oleh dua variabel yaitu variabel ketersediaan infrastruktur fisik dan variabel kualitas infrastruktur. Variabel ketersediaan infrastruktur fisik memiliki bobot sebesar 0,324 atau 32%. Sedangkan variabel kualitas infrastruktur fisik memiliki bobot tertinggi sebesar 0,676 atau 68% dari keseluruhan bobot faktor pendukung infrastruktur fisik.

Faktor Tenaga kerja dan Produktivitas

Tenaga kerja merupakan salah satu indikator yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi di suatu daerah. Tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Faktor tenaga kerja dan produktivitas didukung oleh 3 variabel, yaitu variabel biaya tenaga kerja, variabel ketersediaan tenaga kerja dan variabel produktivitas tenaga kerja. Variabel biaya tenaga kerja memiliki bobot terendah sebesar 0,285 atau 28%, Variabel ketersediaan tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,328 atau 33% dan variabel produktivitas tenaga kerja memiliki bobot tertinggi sebesar 0,387 atau 39% dari keseluruhan bobot faktor pendukung tenaga kerja dan produktivitas.

Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan menjadi indikator yang penting untuk mengukur seberapa jauh iklim sosial politik, peraturan daerah, sistem keuangan daerah dan aspek keamanan dalam menggerakkan dan mendorong aktivitas perekonomian agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Faktor kelembagaan didukung oleh empat variabel, yaitu variabel kepastian hukum, variabel pembiayaan pembangunan (keuangan daerah), variabel aparatur, dan variabel peraturan daerah. Variabel kepastian hukum memiliki bobot sebesar 0,244% atau 24%, Variabel pembiayaan pembangunan atau keuangan daerah memiliki bobot terendah sebesar 0,218 atau 22%, variabel aparatur memiliki bobot terbesar sebesar 0,282 atau 28% dari keseluruhan bobot faktor pendukung kelembagaan dan variabel peraturan daerah memiliki bobot sebesar 0,256 atau 26%.

Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik menjadi indikator penting dalam mengukur kelancaran aktivitas perekonomian suatu daerah dan melihat seberapa jauh perkembangan perekonomian daerah tersebut berhubungan dengan daerah lain. Faktor sosial politik didukung oleh tiga variabel, yaitu variabel stabilitas politik, variabel keamanan dan variabel budaya masyarakat. Variabel stabilitas politik memiliki bobot terendah sebesar 0,223 atau 22%, variabel budaya memiliki bobot sebesar

0,365 atau 36%, sedangkan variabel keamanan memiliki bobot terbesar sebesar 0,412 atau 41% dari keseluruhan bobot faktor pendukung sosial politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Dari hasil pembobotan dan pemeringkatan, faktor utama penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bobot tertinggi adalah faktor perekonomian daerah dengan bobot sebesar 0,320. Diikuti oleh faktor infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 0,217, faktor tenaga kerja dan produktifitas dengan bobot sebesar 0,214, faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 0,132 dan yang terakhir, faktor yang memiliki bobot terendah adalah faktor sosial politik dengan bobot sebesar 0,117.
2. Dalam faktor perekonomian daerah, variabel yang dianggap paling penting dalam memberikan kontribusinya terhadap tingkat daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah variabel potensi ekonomi dengan bobot sebesar 0,632 dan diikuti variabel struktur ekonomi dengan bobot sebesar 0,368.
3. Dalam Faktor infrastruktur fisik, variabel yang dianggap paling penting memberikan kontribusinya dalam peningkatan daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kualitas infrastruktur dengan bobot sebesar 0,676 dan diikuti variabel ketersediaan infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 0,324.
4. Dalam faktor tenaga kerja dan produktivitas, variabel yang dianggap paling penting memberikan kontribusinya adalah variabel produktivitas tenaga kerja dengan bobot sebesar 0,387. Diikuti variabel ketersediaan tenaga kerja dengan bobot sebesar 0,328 dan variabel biaya tenaga kerja dengan bobot sebesar 0,285.
5. Dalam faktor kelembagaan, variabel yang dianggap paling penting memberikan kontribusinya terhadap tingkat daya saing ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah variabel aparatur dengan bobot sebesar 0,282. Diikuti oleh variabel peraturan daerah dengan bobot sebesar 0,256, variabel kepastian hukum dengan bobot sebesar 0,244 dan yang terakhir variabel pembiayaan pembangunan dengan bobot sebesar 0,218.
6. Dalam faktor sosial politik, variabel yang dianggap paling penting memberikan kontribusinya adalah variabel keamanan dengan bobot sebesar 0,412. Diikuti oleh variabel budaya masyarakat dengan bobot sebesar 0,365 dan variabel stabilitas politik dengan bobot sebesar 0,223.

Saran

Dari kesimpulan diatas dapat memberikan saran antara lain:

1. Dengan melakukan peningkatan produktivitas seluruh sektor ekonomi, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang

diiringi dengan pemerataannya sehingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat terjadi secara terus menerus.

2. Diperlukan perbaikan dalam ketersediaan dan kualitas jalan, pelabuhan laut dan ketersediaan pelabuhan udara yang belum ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan demikian, Infrastruktur fisik pada daerah ini diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat memberi kelancaran pada akses sumber-sumber ekonomi yang dihasilkan oleh daerah ini agar dapat disalurkan kepada masyarakat demi kelangsungan hidup dan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Diperlukan perhatian khusus pada upah tenaga kerja agar sesuai dengan ketentuan UMK dan kebutuhan hidup masyarakat serta peningkatan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena tenaga kerja merupakan pelaku utama dalam menjalankan proses produksi pada suatu perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Sementara itu, dalam proses produksi, tenaga kerja memerlukan berbagai macam biaya dalam menjalankan kegiatannya tersebut. Semakin tinggi kinerja suatu perusahaan, maka akan lebih baik dalam membawa daerahnya berdaya saing tinggi.
4. Diperlukan upaya dalam penataan birokrasi maupun aparatur agar memiliki integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat maupun negara. Maka itu, diperlukan landasan moral keagamaan dan strategi kemandirian yang tinggi untuk ditanamkan pada setiap organisasi pemerintahan dan kegiatan masyarakatnya agar dapat membawa kemajuan yang lebih berarti bagi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pemerintah sebagai fasilitator, harus memberikan tingkat keamanan yang tinggi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara agar setiap orang dapat menggali potensi yang dimiliki dan dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan rasa aman sehingga memberikan kelancaran pada aktifitas perekonomian yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Peter dkk, 2002. *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Amrullah, Muhammad Amin, 2014. *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis & Disertasi*, Cetakan Pertama, Smart Pustaka, Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka*. Medan : Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2014. *PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Medan : Badan Pusat Statistik.
- Hasibuan, Muhammad Yusuf. 2011. *Kabupaten Labuhanbatu Utara*. En.m.wikipedia.org/wiki/User:Muhammad_Yusuf_Hasibuan (19 Sept. 2011).
- Hidayat, Paidi, 2012. "Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 3, hal 228-238.
- Huda, M. dan Eko Budi Santoso, 2014. "Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya", *Jurnal Teknik Pomits*, Volume 3 Nomor 2.
- Irawati, Ira. dkk, 2008. "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara", *Prosiding INSAHP5*, Semarang.
- Jayadhita, Mandala, 2011. *Apa Itu Expert Choice?*. <http://ibelog-pintar.blogspot.com/2011/01/apa-itu-expert-choice.html> (23 Januari 2011).
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng, 2005. "Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 2, Hal. 171 – 184. Yogyakarta.
- KPPOD (2005) *Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2005*. Jakarta.
- PPSK BI dan LP3E FE UNPAD. (2008). *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Pasaribu, Syahminan, H, 2011. *Potensi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara*. <http://syahminanpasaribu.blogspot.com/2011/02/potensi-daerah-kabupaten-labuhanbatu.html> (01 Februari 2011).
- Pasaribu, Syahminan, H, 2011. *Grand Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara*. <http://syahminanpasaribu.blogspot.com/2011/07/grand-strategi-penyelenggaraan.html> (18 Juli 2011).
- Retnoningsih, Dwi, 2011 "Pemanfaatan Aplikasi Expert Choice Sebagai Alat Bantu Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus: Pemilihan Program Studi di Universitas Sahid Surakarta)". *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 4 No. 1 (2011): GI Vol. 4 No. 1 Januari 2011.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 1, Alfabeta, Bandung.
- Sumanto, 2014. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2014. *Metodologi Penelitian*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1982. *Metode Penelitian Survei*, Revisi Edisi 1 dan 2, LP3ES, Jakarta.
- Santoso, Eko Budi, 2010. “Strategi Pengembangan Perkotaan di Wilayah Gerbangkertosusila berdasarkan Pendekatan Daya Sain Wilayah”, *Makalah*, Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Surabaya.
- Saaty, Thomas L. (1990). *Decision Making For Leader: The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World*. Pittsburgh : Univesity of Pittsburgh.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafi.(2011).*Penelitian Kuantitatif*, alfabeta, Bandung.
- World Economic Forum, 2014. *The Global Competitiveness Report*, Oxford University Press, New York.